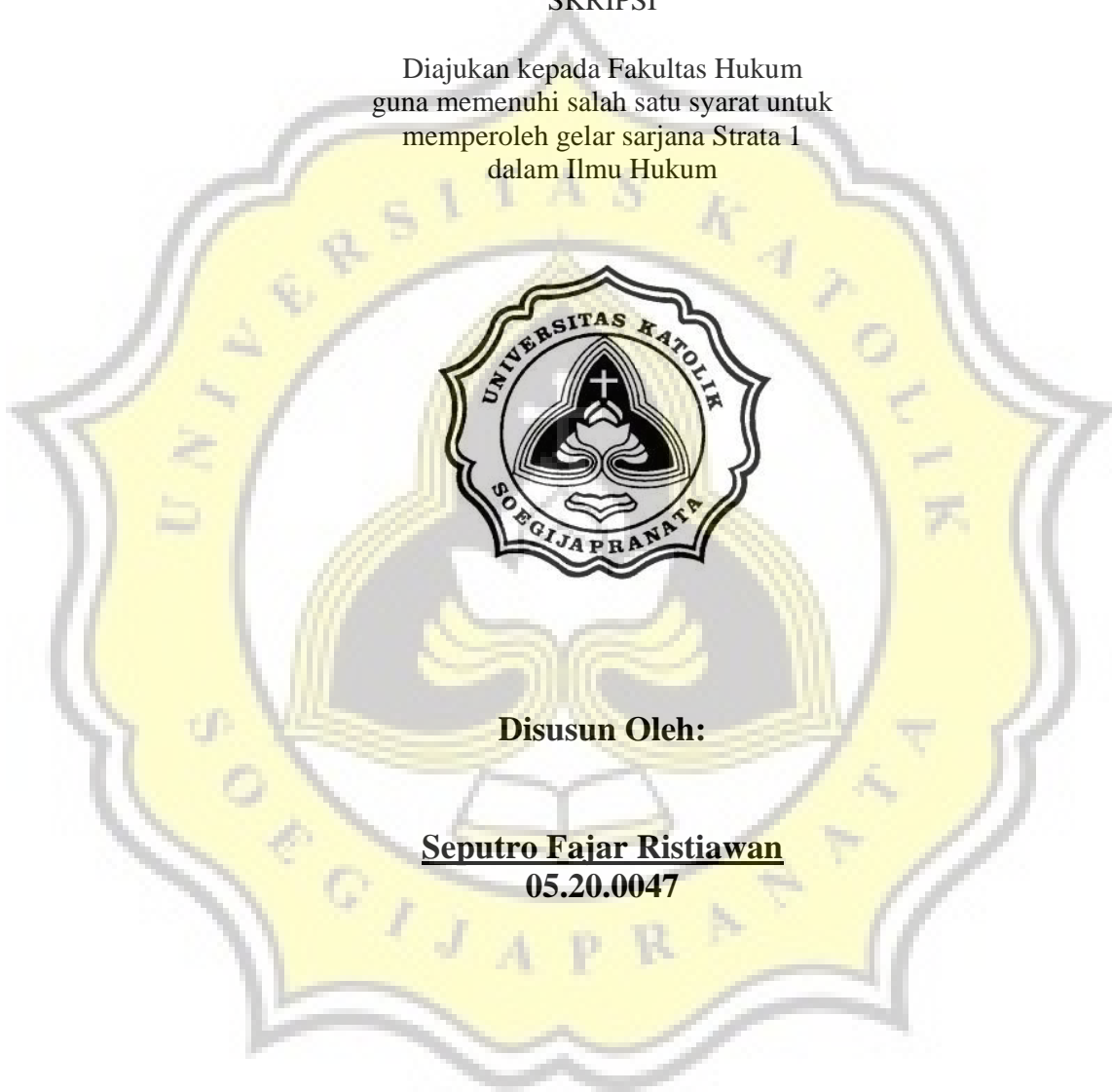


**Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Menata dan
Mengembangkan Transportasi Jalan yang Ramah Lingkungan sebagai
Upaya Pengendalian Pencemaran Udara**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana Strata 1
dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Seputro Fajar Ristiawan
05.20.0047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2009**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Abstraksi	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar dan Grafik	x
Daftar Tabel	xi
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Kebijakan Pemerintah	14
B. Perencanaan Tata Ruang Kota	16
C. Sistem Transportasi Nasional	18
D. Pencemaran Udara dan Pengendaliannya	21
E. Transportasi Ramah Lingkungan	25
Bab III Pembahasan Hasil Penelitian	
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Semarang	34
B. Kondisi Transportasi Kota Semarang Saat Ini	42
C. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Menata dan Mengembangkan Transportasi Jalan yang Ramah Lingkungan sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Udara	45

D. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Menata dan Mengembangkan Transportasi Jalan yang Ramah Lingkungan sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Udara	88
E. Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Menata dan Mengembangkan Transportasi Jalan yang Ramah Lingkungan sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Udara dan Bagaimana Cara Mengatasinya	117
Bab IV Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan	121
B. Saran	127
Daftar Pustaka	
Lampiran	



DAFTAR GAMBAR dan GRAFIK

1. Gambar 1.	Peta Administrasi Kota Semarang	35
2. Grafik 1	Tren pertumbuhan penduduk Kota Semarang	36
3. Gambar 2.	Stasiun pemantau kualitas udara	39
4. Gambar 3.	Papan informasi kualitas udara	39
5. Gambar 4.	Jalur sepeda dengan batasan fisik sebagai pemisah	66
6. Gambar 5.	Desain ruang sepeda	70
7. Gambar 6.	Tipe jalur sepeda	71
8. Gambar 7.	Contoh desain jalur lambat dan parkir sepeda di negara Belanda dan Kolombia.	72
9. Gambar 8.	Pengembangan jalur lambat Kota Semarang	74
10. Gambar 9.	Jalur pejalan kaki di jalan arteri Yos Sudarso	79
11. Gambar 10.	Bus BRT Kota Semarang	89
12. Gambar 11.	Halte BRT	91
13. Gambar 12.	Sistem ticketing BRT	92
14. Gambar 13.	Jalur koridor BRT Kota Semarang	95
15. Gambar 14.	Koridor I BRT Kota Semarang (Mangkang-Penggaron)	96
16. Gambar 15.	Sepeda listrik	98
17. Gambar 16.	Jl Indraprasta	99
18. Gambar 17.	Jl MT. Haryono	99
19. Gambar 18.	Pangkalan becak	102
20. Gambar 19.	Pangkalan Andong	103
21. Gambar 20.	Jl Kampung Kali	105
22. Gambar 21.	Jl Pemuda	105
23. Gambar 22.	PKL di atas trotoar	105
24. Gambar 23.	Jalur hijau	110
25. Gambar 24.	Proses uji berkala	113

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.	Emisi Pencemaran Udara Sumber Bergerak	3
2. Tabel 2.	Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Tengah	4
3. Tabel 3.	Rekap kualitas udara ambien Kota Semarang berdasarkan ISPU dirinci menurut tahun 2003	4
4. Tabel 4.	Banyaknya penduduk menurut kecamatan	36
5. Tabel 5.	Jumlah kendaraan bermotor tahun 1996-2004	37
6. Tabel 6.	Data Pertambahan Ranmor Baru 4 Tahun Terakhir	38
7. Tabel 7.	Data Ranmor 4 Tahun Terakhir	38
8. Tabel 8.	Baku mutu udara ambien Propinsi Jawa Tengah	40
9. Tabel 9.	Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien Bulan Nopember 2008	41
10. Tabel 10.	Pengaturan jarak tanaman	83
11. Tabel 11.	Usulan koridor pelayanan BRT	93
12. Tabel 12.	Jumlah becak di Kota Semarang	101
13. Tabel 13.	Kecelakaan yang melibatkan korban pejalan kaki	107
14. Tabel 14.	Kondisi RTH Kota Semarang Tahun 2006	109

ABSTRAKSI

Penulisan Skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Menata dan Mengembangkan Transportasi Jalan yang Ramah Lingkungan sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Udara”** ini dilatarbelakangi semakin buruknya kualitas udara di kota Semarang akibat pencemaran dari sistem transportasi kota Semarang. Di dalam skripsi ini dibahas tiga permasalahan, yaitu bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam menata dan mengembangkan transportasi jalan yang ramah lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran udara; bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam menata dan mengembangkan transportasi jalan yang ramah lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran udara; dan hambatan apa yang timbul dalam menata dan mengembangkan transportasi jalan yang ramah lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran udara serta bagaimana cara mengatasinya.

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini membutuhkan data primer yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan seperti Peraturan daerah Kota Semarang, SK Walikota Semarang, Raperda Lalin Kota Semarang, Tatralok Kota Semarang, Masterplan Kota Semarang, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti peraturan yang berlaku baik di tingkat pust maupun tingkat propinsi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kebijakan menata dan mengembangkan transportasi jalan yang ramah lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran udara dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Semarang Surat Keputusan Walikota, Tatralok, dan Masterplan. Berdasarkan penelitian, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan oleh instansi-instansi terkait seperti: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Dinas Perhubungan Kota Semarang, Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, dan Organda Kota Semarang. Ada beberapa upaya Pemerintah Kota Semarang berkaitan dengan pengembangan dan penataan transportasi jalan yang ramah lingkungan, diantaranya adalah pengembangan transportasi massal (BRT) guna menekan jumlah kendaraan pribadi; pengembangan ruang publik yang meliputi perencanaan jalur lambat, perencanaan jalur pejalan kaki, serta ruang terbuka hijau; dan uji emisi kendaraan bermotor.

Kebijakan yang sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang tidak salamanya berjalan dengan lancar. Ada beberapa hambatan yang timbul baik dari Pemerintah Kota Semarang itu sendiri maupun dari masyarakat. Dari Pemerintah Kota Semarang hambatan yang timbul meliputi: belum adanya sistem atau hukum yang secara komprehensif mengatur mengenai pencemaran lingkungan dan pengembangan transportasi jalan yang ramah lingkungan; sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang kurang; keterbatasan biaya; Pemerintah Kota Semarang tidak konsisten dalam mengembangkan transportasi jalan yang ramah lingkungan. Dari masyarakat, hambatan yang timbul meliputi; kurang kesadaran masyarakat dalam merawat sarana prasarana transportasi; peran serta masyarakat yang kurang dalam pengujian berkala kendaraan bermotor; dan daya beli masyarakat Kota Semarang yang tinggi terhadap kendaraan bermotor.

Kata kunci: kebijakan, transportasi, lingkungan hidup, dan Kota Semarang.